

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan topik pengaruh likuiditas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. **Yetty Murni (2016)**

Tujuan dari penelitian ini guna memperoleh bukti empiris tentang pengaruh dari ukuran perusahaan, profitabilitas, umur listing, dan komposisi dewan komisaris terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela laporan tahunan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diteliti adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan 30 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Variabel yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, umur *listing*, dan komposisi dewan komisaris. Menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, dan likuiditas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela, sedangkan profitabilitas, umur *listing* dan komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh.

Persamaan :

- a) Menggunakan pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen dan profitabilitas sebagai variabel independen.

- b) Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda
- c) Jenis perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan ukuran perusahaan, likuiditas, umur *listing*, dan komposisi dewan komisaris sebagai variabel independen, penelitian saat ini menggunakan likuiditas, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen.
- b) Penelitian terdahulu periode penelitian tahun 2012-2014, penelitian saat ini periode penelitian tahun 2013-2016

2. Indra Gunawan (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui porsi kepemilikan saham institusional, *lverage*, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Data yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah porsi kepemilikan saham institusional, *lverage*, profitabilitas, dan likuiditas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa porsi kepemilikan saham institusional, profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh signifikan. Sedangkan *lverage* tidak berpengaruh signifikan.

Persamaan :

- a) Menggunakan pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen likuiditas sebagai variabel independen
- b) Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan porsi kepemilikan saham institusional, *lverage*, profitabilitas, dan likuiditas sebagai variabel independen. Penelitian saat ini menggunakan likuiditas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas sebagai variabel independen
- b) Penelitian terdahulu periode penelitian tahun 2012-2013, penelitian saat ini periode penelitian tahun 2013-2016.

3. Godeliva Paluan dan Paskah Ika Nugroho (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kondisi *financial distress* terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Data yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 47 perusahaan. Variabel yang digunakan yaitu mekanisme *corporate governance*, dan *financial distress*. Menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, dewan komisaris, dan kondisi *financial distress* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Sementara itu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak mempengaruhi pengungkapan sukarela secara signifikan.

Persamaan :

- a) Menggunakan pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen
- b) Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda

- c) Jenis perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan mekanisme *corporate governance* dan *financial distress* sebagai variabel independen, penelitian saat ini menggunakan likuiditas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas sebagai variabel independen
- b) Penelitian terdahulu periode penelitian tahun 2010-2012, penelitian saat ini periode penelitian tahun 2013-2016

4. Nadia Septiana Putri, Gede Adi Yuniarta, dan Nyoman Ari Surya darmawan (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan, proporsi kepemilikan, ukuran, dan status perusahaan terhadap luas pengungkapan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013 baik secara parsial maupun simultan. Data yang diteliti adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling*. Variabel yang digunakan yaitu kinerja keuangan, proporsi kepemilikan, ukuran, dan status perusahaan. Menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan perusahaan, variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif, sedangkan variabel likuiditas, *leverage*, proporsi kepemilikan, dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan perusahaan.

Persamaan :

- a) Menggunakan profitabilitas, dan likuiditas sebagai variabel independen
- b) Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan proporsi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan status perusahaan sebagai variabel independen. Penelitian saat ini menggunakan likuiditas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas sebagai variabel independen
- b) Penelitian terdahulu periode penelitian tahun 2009-2013, penelitian saat ini periode penelitian tahun 2013-2016

5. Maria Karlina Marselin Nabor dan Ketut Alit Suardana (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan *proprietary cost* terhadap pengungkapan sukarela. Data yang diteliti adalah dari perusahaan *listing* di BEI periode 2012. Penelitian ini menggunakan metode *probability sampling*. Variabel yang digunakan yaitu *proprietary cost*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *proprietary cost* berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Persamaan :

- a) Menggunakan pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen
- b) Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan *proprietary cost*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Penelitian saat ini menggunakan likuiditas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas sebagai variabel independen
- b) Penelitian terdahulu periode penelitian tahun 2012, penelitian saat ini periode penelitian tahun 2013-2016

6. Dwi Harista Yuniarsyah (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela. Data yang diteliti adalah dari perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Variabel yang digunakan yaitu likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Persamaan :

- a) Menggunakan pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen. Likuiditas, dan profitabilitas sebagai variabel independen
- b) Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Penelitian saat ini menggunakan likuiditas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas sebagai variabel independen
- b) Penelitian terdahulu periode penelitian tahun 2010-2012, penelitian saat ini periode penelitian tahun 2013-2016.

7. Made Satria Jaya Krishna (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui tingkat likuiditas, *lverage*, ukuran perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik secara parsial atau positif terhadap pengungkapan sukarela. Data yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2011. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas, *lverage*, ukuran perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, *lverage*, ukuran perusahaan, dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh signifikan.

Persamaan :

- a) Menggunakan pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen likuiditas sebagai variabel independen
- b) Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.

Perbedaan :

- a) Penelitian terdahulu menggunakan likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan dan reputasi kantor akuntan publik sebagai variabel independen. Penelitian saat ini menggunakan likuiditas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan profitabilitas sebagai variabel independen
- b) Penelitian terdahulu periode penelitian tahun 2008-2011, penelitian saat ini periode penelitian tahun 2013-2016.

2.2 Landasan Teori

Adapun teori-teori yang mendukung topik penelitian yang akan digunakan sebagai landasan penelitian sebagai berikut :

2.2.1. Teori Keagenan

Scott (2012:340) mengartikan teori agensi sebagai berikut:

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interests would otherwise conflict with those of the principal.”

Teori agensi adalah pengembangan dari teori game yang mempelajari desain kontrak dimana para agen bekerja/bertugas atas nama principal ketika keinginan/tujuan mereka bertentangan dengan principal maka akan terjadi suatu konflik. Teori agensi menyatakan bahwa masing-masing pihak hanya termotivasi

oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya maka manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki *welfare motives* yang bersifat jangka panjang sebaliknya manajemen cenderung memaksimalkan profit jangka pendek dengan mengabaikan *sustainability* keuntungan dalam jangka panjang.

Pada kerangka teori keagenan, terdapat tiga macam hubungan keagenan, yaitu: 1) hubungan keagenan antara manajer dengan pemilik, 2) hubungan keagenan antara manajer dengan kreditur dan 3) hubungan keagenan antara manajer dengan pemerintah. Hal ini berarti ada kecenderungan bagaimana manajer untuk melaporkan sesuatu dengan cara-cara tertentu dalam rangka memaksimalkan utilitas mereka dalam hal hubungannya dengan pemilik, kreditur maupun pemerintah.

Jensen dan Meckling (1976:59) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang lebih (prinsipal) memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Pemilik usaha atau pemegang saham sebagai pihak prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada laba yang tinggi dan maksimisasi kekayaan pemegang saham. Sedangkan manajemen sebagai pihak agen diasumsikan tertarik untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Perlu ada pengawasan yang memadai agar kedua pihak memiliki keseimbangan informasi mengenai kondisi

perusahaan. Prinsipal akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya dan laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas utama agen kepada prinsipal, maka informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan haruslah lengkap.

Teori keagenan (*agency theory*) berawal dari adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Selama ini teori keagenan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan praktik akuntansi perusahaan. Menurut Eisenhardt (1989) dalam Priguna dan Hadiprajitna (2013) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: 1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), 2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded-rationality*), 3) manusia selalu menghindari risiko (*risk-averse*). *Agency problem* muncul karena manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri dan konflik muncul ketika beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas bersama.

Pengungkapan informasi secara sukarela yang dilakukan manajer dapat mengurangi biaya agensi yang terjadi jika pengungkapan tersebut dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Selain itu, pengungkapan secara sukarela ini menunjukkan kredibilitas perusahaan dan dapat membantu para pemakai laporan untuk memahami strategi dan berbagai informasi lainnya tentang perusahaan yang dibutuhkan. Untuk memperkecil asimetri informasi, maka pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelola dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sharpe (1997) pengumuman informasi akuntansi memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang (*good news*) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun social public terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar.

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Meskipun semua perusahaan publik telah diwajibkan untuk memenuhi standar minimum pengungkapan, tetapi masing-masing perusahaan berbeda secara substantial dalam hal banyaknya informasi sukarela yang diungkap ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Perusahaan dapat menarik perhatian lebih banyak analis, meningkatkan akurasi ekspektasi pasar, menurunkan kejutan pasar (*market surprise*) dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas.

2.2.2. Laporan Keuangan

Kondisi finansial suatu perusahaan dapat melakukan analisis atau interpretasi terhadap data finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Pengertian laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan dibuat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak

dalam maupun pihak luar yang terkait. Laporan keuangan menurut Soemarsono adalah laporan yang dibuat untuk para pembuat keputusan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut SAK (2015) yang dikeluarkan oleh IAI tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Menurut Suwardjono (2005) tujuan dari pelaporan tersebut menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. APB Statement No.4 mengklasifikasikan tujuan pelaporan secara khusus, umum, dan kualitatif dengan menempatkannya di bawah serangkaian batasan (Belkoui, 2000). Tujuan-tujuan tersebut diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan.
2. Tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis dengan tujuan untuk:
 1. Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan
 2. Menunjukkan pendanaan dan investasi
 3. Mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi komitmen
 4. Menunjukkan basis sumber daya untuk pertumbuhan
 - b) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit dengan tujuan untuk:
 1. Menunjukkan tingkat kembalian deviden harapan bagi investor.
 2. Menunjukkan kemampuan operasi untuk membayar kreditor dan pemasok, menyediakan pekerjaan bagi karyawan, membayar pajak, dan menghasilkan dana untuk ekspansi.
 3. Menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian.
 4. Menunjukkan profitabilitas jangka panjang.
 - c) Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi *earnings potensial* perusahaan.

- d) Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban.
 - e) Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai.
3. Tujuan kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:
- a) Relevan, memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi.
 - b) Dapat memahami, selain harus jelas informasi yang dipilih, juga harus dapat dipahami pemakai.
 - c) Dapat diuji kebenarannya, hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuran-ukuran yang independen, menggunakan metode pengukuran yang sama.
 - d) Netral, informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan khusus pemakai tertentu.
 - e) Tepat waktu, berarti mengkomunikasikan informasi secepat mungkin untuk menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi.
 - f) Dapat diperbandingkan, perbedaan-perbedaan seharusnya tidak mengakibatkan perlakuan akuntansi yang berbeda.
 - g) Kelengkapan, semua informasi yang memenuhi persyaratan tujuan-tujuan kualitatif lain harus dilaporkan.

2.2.3. Pihak-Pihak Pengguna Laporan Keuangan

Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan oleh banyak pihak sesuai kepentingan masing-masing atas laporan keuangan tersebut. Standar Akuntansi Keuangan (IAI,2014) memaparkan para pemakai laporan keuangan meliputi:

1. Investor

Penanaman modal berisiko dan penasihat, mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, imbalan, pascakerja, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman (*Lenders*)

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh temponya.

4. Pemasok dan kreditur usaha lainnya

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama yang terlihat dalam perjanjian jangka panjang dengan bergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistic pendapatan nasional dan statistic lainnya.

7. Masyarakat

Masyarakat mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memebrikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

8. Manajemen Perusahaan

Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan. Informasi ini membantuk manajemen dalam melaksanakan tanggungjawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

2.2.4. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Kualitas tampak sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Menurut Simanjuntak dan Widiastuti (2004) banyak penelitian yang menggunakan *indeks of disclosure methodology* untuk mengukur kualitas pengungkapan, kemudian hasil dari perhitungan *indeks* tersebut digunakan untuk menilai manfaat potensial dari sisi laporan keuangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, tingginya kualitas informasi akuntansi berkorelasi positif terhadap tingkat kelengkapan yang diungkapkan. Berapa banyak informasi yang harus di *disclose* tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, namun juga tergantung pada standar yang dianggap cukup.

Menurut Hendriksen, (1987: 204), terdapat tiga konsep yang umumnya diungkapkan, yaitu:

1. *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup) pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimum yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.
2. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar) menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang persis sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan.
3. *Full disclosure* (pengungkapan penuh) pengungkapan ini mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan dari beberapa pihak.

Pengungkapan informasi yang berlebihan atau melimpah dipandang tidak baik dan dapat membahayakan, karena dapat mengaburkan tafsiran informasi dan

dapat merugikan posisi kompetitif perusahaan sendiri. Pada umumnya terdapat dua jenis pengungkapan terkait dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan atau standar (*required/regulated/mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang diwajibkan dan diatur dalam suatu peraturan sehingga harus disajikan oleh perusahaan.
2. Pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan secara sukarela, tanpa dipaksakan oleh peraturan. Informasi yang diungkapkan dalam *voluntary disclosure* berbeda dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut Na'im dan Rakhman (2000) manfaat dari pengungkapan sukarela yang diperoleh perusahaan antara lain meningkatkan kredibilitas perusahaan, membantu investor memahami strategi bisnis manajemen, menarik perhatian analis meningkatkan akurasi pasar, menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar, dan menurunkan kejutan pasar.

2.2.5. Luas Pengungkapan Sukarela

Kata *disclosure* memiliki arti kata tidak Kata *disclosure* memiliki arti kata tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila kata *disclosure* ini dikaitkan dengan laporan keuangan, maka mengandung arti penyajian laporan keuangan yang memberikan informasi secara lengkap dan jelas, serta dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi suatu unit usaha. Meek *etal.*, (1995) menyebutkan bahwa pengungkapan

sukarela merupakan pengungkapan bebas, dimana manajemen dapat memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak pemakainya.

Menurut Belkaoui (2000) tujuan dilakukannya pengungkapan ada lima, yaitu:

1. Menjelaskan *item-item* yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi *item-item* tersebut.
2. Menjelaskan *item-item* yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi *item-item* tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
3. Menyediakan informasi bagi investor dan kreditor dalam menentukan risikodan *item-item* yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
4. Menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun.
5. Menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang.

Manajer memiliki informasi lengkap mengenai kinerja perusahaan saat ini dan pada masa mendatang dibandingkan dengan pihak eksternal, namun manajer memiliki beberapa pertimbangan untuk melakukan pengungkapan tersebut. Supto (1999) menyebutkan bahwa pertimbangan manajer untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi faktor biaya dan manfaat. Manajemen akan mengungkapkan informasi secara sukarela bila manfaat yang diperoleh dari pengungkapan informasi lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pengungkapan tersebut. Biaya pengungkapan sukarela berupa seluruh pengorbanan

yang berhubungan langsung atau tidak langsung terhadap penerbitan laporan sukarela. Menurut Elliot *etal.* (1994) dalam Aprilia (2008) biaya pengungkapan informasi terdiri dari:

1. Biaya pengembangan dan penyajian informasi yang meliputi biayapengumpulan, biaya pemrosesan, biaya pemeriksaan informasi (jika diperlukan) dan biaya penyebaran informasi.
2. Biaya litigasi (*litigation costs*) yang timbul karena aspek hukum. Biayalitigasi muncul ketika terdapat informasi negatif tentang perusahaan atau pengungkapan informasi yang menyesatkan. Manajer meningkatkan pengungkapannya dengan maksud untuk menurunkan risiko terhadap tuntutan hukum, karena ketika informasi negatif tersebut ditunda untuk diungkapkan akan berpotensi memunculkan kerugian terhadap beberapa pihak, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perusahaan terkena masalah hukum.
3. Biaya *competitive disadvantage* yaitu kerugian yang timbul akibat pengungkapan informasi yang melemahkan daya saing perusahaan seperti informasi tentang inovasi teknologi dan manajerial serta informasi tentang strategi, rencana, dan taktik untuk mencapai target pasar baru.

Besarnya biaya dan manfaat pengungkapan informasi antar perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Bagi perusahaan besar, biaya pengungkapan informasi cenderung lebih rendah karena terdapat unsur biaya tetap. Oleh karena itu, biaya dan manfaat pengungkapan sukarela kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik tertentu perusahaan sehingga akan

mengakibatkan perbedaan luas pengungkapan dalam laporan tahunan antara perusahaan satu dengan yang lainnya.

2.2.6. Peraturan Terkait Penyajian Laporan Tahunan

Peraturan yang ada di Indonesia mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan diatur oleh Bapepam pada tahun 1996. Bapepam mengeluarkan Peraturan Nomor VIII.G.2 dalam Lampiran Keputusan BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996 yang mengatur tentang kewajiban menyampaikan laporan tahunan bagi perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum dan Perusahaan Publik, serta mengatur bentuk dan isi laporan tahunan tersebut, yang terdiri dari: ketentuan umum, laporan manajemen, iktisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, dan bagian mengenai laporan keuangan.

Kemudian pada tahun 2002, Bapepam kembali mengeluarkan peraturan dalam Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik untuk tiga belas industri, salah satunya termasuk industri manufaktur. Pada tanggal 7 Desember 2006, Bapepam menerbitkan peraturan baru untuk memperbaharui peraturan yang ada, yaitu Peraturan Nomor X.K.6 dalam Lampiran Keputusan BAPEPAM No. Kep-134/BL/2006. Dalam peraturan ini menyoroti lebih spesifik, yaitu bentuk dan isi laporan tahunan yang terdiri dari ketentuan umum, iktisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, laporan keuangan yang telah diaudit, dan tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

2.2.7. Likuiditas

Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial yang harus segera dilunasi. Likuiditas menunjukkan nilai kekayaan lancar (yang segera dapat dijadikan uang) dapat menutupi hutang lancar yang ada. Dapat dipahami bahwa rasio likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang segera jatuh tempo dengan sumber daya jangka pendek yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tersebut. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya.

Secara finansial perusahaan yang kuat akan lebih mengungkapkan informasi dibandingkan dengan perusahaan yang kemampuan finansialnya lemah. Hal ini didukung oleh pernyataan Cooke (1989) bahwa kondisi perusahaan yang sehat, yang antara lain ditunjukkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas. Untuk mengukur variabel likuiditas ada dua indikator yang sering digunakan, yaitu:

1. Rasio lancar (*current ratio*) merupakan rasio paling umum yang digunakan untuk mengukur kesanggupan pemenuhan liabilitas jangka pendek. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancarnya, dimana aktiva akan berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus bisnis (Hanafi dan Halim 2014:75)

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2. Rasio cepat (*quick ratio*) merupakan rasio yang mampu menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid menutupi hutang lancar. Cara perhitungan *Quick Ratio* yaitu dengan mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aset lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Menurut Weston dalam Kasmir (2008:130) rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya jika perusahaan ditagih, maka perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dalam praktiknya terdapat beberapa perusahaan yang memiliki kelebihan dana, hal ini juga tidak baik bagi perusahaan karena terdapat aktivitas yang tidak dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan karena manajemen kurang mampu menjalankan kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam hal menggunakan dana yang dimiliki.

2.2.8. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah besar proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial sebagai salah satu variabel *corporate governance* mencerminkan pengaruh dari pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan pengungkapan perusahaan. Pemberian saham kepada manajemen perusahaan merupakan salah satu solusi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyelaraskan kepentingan pihak prinsipal dan agen. kepemilikan manajerial rendah, maka potensi timbulnya masalah agensi akan semakin besar.

Kepemilikan manajerial dapat menurunkan biaya agensi karena konflik agensi antara prinsipal dan agen semakin berkurang dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin besar kemauan manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik dari pemegang saham. Menurut Barros, *et al.* (2013) para manajer akan mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya agensi yaitu biaya pengawasan yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mencegah terjadinya masalah agensi. Variabel kepemilikan manajerial dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{kepemilikan manajerial} = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham}}{\text{jumlah saham besar}} \times 100\%$$

2.2.9. Kepemilikan Institutional

Jensen dan Meckling (1976:305) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Tingkat

kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer.

Menurut Shleifer and Vishny (dalam Barnae dan Rubin, 2005) bahwa institutional *stakeholders* dengan kepemilikan saham yang besar memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Begitu pula penelitian Wening (2009) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Penelitian Smith (1996) (dalam Suranta dan Midiastuty, 2004) menunjukkan bahwa aktivitas monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hal ini didukung oleh Cruthley et al., (dalam Suranta dan Midiastuty, 2004) yang menemukan bahwa monitoring yang dilakukan institusi mampu mensubstitusi biaya keagenan lain sehingga biaya keagenan menurun dan nilai perusahaan meningkat. Variabel ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusi}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

2.2.10. Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston (2001:89) profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga mempengaruhi kelengkapan pengungkapan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin luas pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Prasetya, 2007).

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Terdapat tiga indikator pengukuran untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, antara lain *profit margin*, *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE). *Profit margin* menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu, *return on asset* mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat aset tertentu, sedangkan *return on equity* (ROE) mengukur pengambilan atas ekuitas saham biasa atau tingkat pengambilan atas investasi pemegang saham biasa. Semakin tinggi rasio profitabilitas, berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan semakin luas pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya pengaruh positif antara profitabilitas dengan luas tingkat pengungkapan berhasil dibuktikan oleh Simanjuntak dan Widiastuti (2004) dalam penelitiannya.

Menurut Kasmir (2008:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Profitabilitas yang tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan informasi yang lebih rinci, hal ini disebabkan karena manajer ingin meyakinkan investor terhadap profitabilitas perusahaannya mengingat kebanyakan para investor lebih menyukai perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, dengan harapan perusahaan mampu memberikan tingkat pengambilan yang tinggi. Pengukuran variabel profitabilitas dapat menggunakan rumus-rumus berikut:

1. *Profit Margin*

Profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengefisienkan biaya-biaya perusahaan pada periode tertentu. Perhitungan *profit margin* digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. *Profit margin* yang tinggi menandakan pada tingkat penjualan tertentu, perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi. *Profit margin* yang rendah menandakan pada tingkat biaya tertentu menghasilkan penjualan yang terlalu rendah. Rasio yang rendah menunjukkan ketidakefisienan manajemen (Hanafi dan Halim, 2014:81)

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Return on Asset (ROA)*

Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset (Hanafi dan Halim, 2014:81-82)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. *Return on Equity* (ROE)

Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini dilihat dari sudut pemegang saham (Hanafi dan Halim, 2014:82)

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

2.3 Hubungan Variabel Independen dengan Pengungkapan Sukarela

2.3.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Sukarela

Perusahaan yang dalam kondisi sehat, kemungkinan akan lebih banyak mengungkapkan informasi dibanding dengan perusahaan yang likuiditasnya rendah. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi akan cenderung memberikan pengungkapan yang lebih lengkap. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur jangka pendek.

Cooke (1989) dalam Marwata (2001) menjelaskan bahwa tingkat likuiditas dapat dipandang dua sisi. Disatu sisi, tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel.

Wallace et al (1994) dalam Fitriani (2001) menyatakan bahwa likuiditas dapat juga dipandang sebagai ukuran kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Dari sisi ini, perusahaan dengan likuiditas rendah cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi kepada pihak eksternal sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen.

Berpengaruhnya Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Sukarela juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Indra Gunawan (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sukarela

Penelitian terhadap variabel kepemilikan manajerial dihubungkan dengan teori agensi. Pemisahan kepemilikan dan fungsi pengendalian dipertimbangkan oleh para peneliti dan praktisi sebagai penyebab utama dari konflik yang terjadi antara manajer dengan pemilik perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah agensi muncul ketika pemilik (prinsipal) mempekerjakan seorang manajer (agen) untuk menjalankan perusahaan tetapi manajer tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini mendorong manajer untuk melakukan aktivitas yang dapat memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Aktivitas tersebut contohnya menyajikan informasi laba perusahaan secara berlebihan, melalaikan tanggungjawabnya, dan *empire building*. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa manajer memiliki dorongan untuk tidak memebrikan informasi kepada pihak luar perusahaan demi keuntungan pribadinya sendiri.

Kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan presentase kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan dewan direksi yang ditunjukkan dalam catatan laporan keuangan. Menurut Juhmani (2013), dalam rangka menyelaraskan kepentingan antara pemilik dan manajer (agen), solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sebagian saham perusahaan kepada manajer. Ketika manajer menjadi bagian dari pemegang saham perusahaan, mereka akan termotivasi untuk

meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat menyebabkan naiknya kekayaan pemegang saham. Peningkatan kekayaan pemegang saham pada akhirnya juga akan menyebabkan kekayaan manajer naik. Oleh karena itu, pengungkapan informasi meningkat karena manajer sebagai pemegang saham dalam jumlah besar dapat memperoleh keuntungan dari harga pasar saham yang tinggi, yang diperoleh dengan cara menurunkan biaya agensi yang harus ditanggung oleh perusahaan melalui pengungkapan informasi yang lebih baik. Ketika manajer memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik perusahaan (investor), maka manajer akan mengungkapkan lebih banyak informasi.

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik agensi antara manajer dan pemegang saham sehingga biaya agensi dapat menurun (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik agensi dapat berkurang karena adanya keselarasan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan. Menurut Barros, *et., al* (2013) manajer dengan kepemilikan yang tinggi memiliki sedikit dorongan untuk melakukan tindakan demi keuntungan pribadinya. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin besar pula kemauan manajer untuk bertindak demi kepentingan terbaik dari pemegang saham. Para manajer akan mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya agensi yaitu biaya pengawasan yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mencegah terjadinya masalah agensi. Namun Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dapat dilihat dari penelitian yaitu Godeliva Paluan dan Paskah Ika Nugroho (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Pihak institusional dapat melakukan pengawasan yang lebih baik daripada pihak manajerial karena pihak institusional memiliki keuntungan lebih untuk memperoleh informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan manajer. Besarnya kepemilikan institusional memebrikan tekanan kepada manajer yang ingin terlihat baik di depan pemegang saham dengan memperlihatkan kinerjanya. Investor institusional yang memiliki proporsi besar dalam kepemilikan saham perusahaan dapat mendesak agar manajer melakukan pengungkapan sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Uyar, Kilic, dan Bayyurt (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusional akan meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan di Turkey. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rouf dan Harun (2011) pada perusahaan di Bangladesh.

Berpengaruhnya Kepemilikan Institusional terhadap Luas Pengungkapan Sukarela didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Indra Gunawan (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

2.3.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela

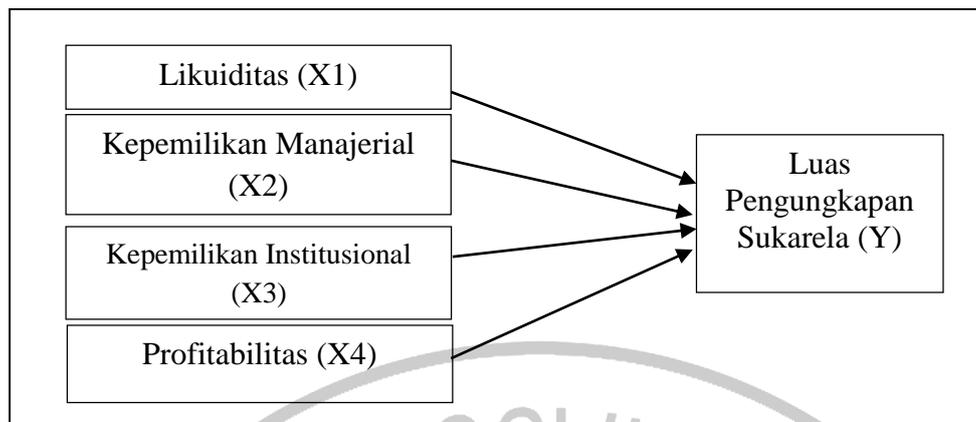
Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga mempengaruhi kelengkapan pengungkapan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin lengkap pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Fitriyani

(2001) membuktikan bahwa variabel *net profit margin* mempunyai hubungan positif dengan kelengkapan pengungkapan. Jadi semakin tinggi *net profit margin* suatu perusahaan maka akan semakin tinggi indeks. Profit margin mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, atau biaya yang tinggi untuk tingkat penjualan tertentu.

Berpengaruhnya Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan Sukarela didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Nadia Septiani Putri (2015), dan Indra Gunawan (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Luas Pengungkapan Sukarela.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel independen meliputi Likuiditas (X1), Kepemilikan Manajerial (X2), Kepemilikan Institusional (X3) dan Profitabilitas (X4) terhadap variabel dependen yaitu Luas Pengungkapan Sukarela (Y).



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

2.5 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dengan tujuan penelitian, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela
- H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela
- H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela
- H4 : Profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela.